KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ibu kota pindah, DPR terbelah
Tanggal : Jumat, 03 Mei 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Ibu Kota Pindah, DPR Terbelah

RENCANA Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara memicu pro dan kontra. Internal DPR RI pun terbelah menyikapi agenda besar tersebut.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyatakan, mendukung rencana memindahkan ibu kota Indonesia. Alasannya, DKI Jakarta saat ini sudah terlalu ramai dan padat. "Kondisi Jakarta sebagai kota pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis itu sudah sangat 'crowded'," kata Amali kepada wartawan, Rabu (1/5).

Amali mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh sejumlah negara yang memisahkan ibu kota dan pusat bisnis. Beberapa di antaranya, Malaysia dan Brasil.

"Saya kira ini harus ada keberanian memulai. Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi, misalnya beliau diputuskan KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, harus berani memulai itu," ujar politikus Golkar itu. "Apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya."

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Sebab, banyak aspek yang harus dipersiapkan agar sebuah lokasi layak menjadi ibu kota.

"Mendorong pemerintah untuk melakukan studi kelayakan ibu kota secara mendalam, terutama dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota. Seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun SDM, sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan," kata politikus Partai Golkar itu, Rabu (1/5).

Selain soal persiapan fisik dan SDM, Bamsoet juga mengingatkan terkait biaya yang harus digelontorkan negara. "Pemerintah harus mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik, mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar," ujar Bamsoet.

Selain itu, dia menuturkan, pemerintah tetap menjaga koordinasi antarkementerian dan lembaga. Dia tidak ingin pemindahan ibu kota justru menimbulkan masalah lain. "Mendorong pemerintah untuk dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik, sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, mengingat pemindahan ibu kota bersifat jangka panjang," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut, kepusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota merupakan upaya pengalihan isu. Politikus Partai Gerindra itu bahkan menilai rencana tersebut hanya omong kosong belaka.

"Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu ya. Dulu juga begitu empat tahun, lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri," kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Fadli, isu pemindahan Ibu Kota RI sudah pernah bergulir, tetapi tidak kunjung terwujud. Tapi, jika rencana tersebut benar, Fadli meminta pemerintah mempersiapkannya matang-matang. "Sudahlah, ini omong kosong. Omong kosong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," tukasnya.

Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jokowi untuk mendahulukan perbaiki kesejahteraan rakyat. Dia meminta Jokowi untuk tidak main-main dengan melemparkan wacana ibu kota. Pasalnya, ibu kota menjadi ibu Indonesia. "Jangan becanda soal ibu kota... Bisa durhaka... Ibu kota bicara seperti ibu kita...," kata Fahri kemarin.

Ketimbang menyetujui pemindahan ibu kota, Fahri justru mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Memperhatikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu, harus membayar upah tenaga pengajar, mengangkat guru honorer serta meningkatkan fasilitas pendidikan seperti perbaikan sekolah.

Menurut Fahri, hal tersebut menjadi hal utama yang perlu diperhatikan saat ini. "Selesaikan defisit BPJS dulu supaya pelayanan kesehatan jangan terbengkalai," tandasnya.

"Bayar gaji guru, angkat guru honorer, bangun ruang kelas dan perbaiki sekolah...Itu lebih prioritas... Banyak lagi!," kata Fahri. (aen)